

EVALUASI KINERJA KOMITE SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 BALANTAK KABUPATEN BANGGAI

Nurma Hasmin, Abd. Kadim Masaong, Arifin Sukung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan program komite Sekolah (2) pelaksanaan program komite Sekolah (3) hasil kinerja komite Sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan model evaluasi Countenance Stake dan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) evaluasi kinerja komite sekolah pada perencanaan program kerja berada pada kualifikasi cukup. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah perencanaan-perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komite sekolah meskipun tidak sepenuhnya tercapai; (2) evaluasi kinerja komite sekolah dalam melaksanakan program kerja berada pada kualifikasi baik, adanya implementasi program kerja yang telah dicanangkan oleh komite sekolah seperti terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pendidikan di SMP Negeri 1 Balantak; (3) evaluasi hasil kinerja komite sekolah berada pada kualifikasi baik. Hasil menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah sudah baik dari segi pelaksanaannya dan hasil yang dicapainya.

Kata Kunci: evaluasi, kinerja komite sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan bermutu bagi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tapi masyarakat juga dituntut perannya dalam hal ini. Hal itu tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adanya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan suatu wujud demokratisasi pendidikan sehingga segala keputusan strategis tentang penyelenggaraan wajib melibatkan masyarakat.

Mekanisme peranserta dan sumber daya masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan memerlukan adanya suatu regulasi sehingga lebih tepat guna. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan No 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah. Regulasi ini mengatur tentang acuan pembentukan Komite Sekolah yang berhubungan dengan pengertian, nama, ruang lingkup, kedudukan dan sifat, tujuan, peran dan fungsi, dan struktur organisasi. Dengan demikian, pembentukan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan.

Eksistensi Komite Sekolah memiliki beberapa tujuan yaitu 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti seluruh aspirasi dan prakarsa masyarakat terkait dengan kebijakan operasional dapat tersalurkan melalui lembaga ini. 2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan adanya Komite Sekolah maka tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan 3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan

dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 1 Balantak diperoleh informasi bahwa minimnya kegiatan sosialisasi tentang program sekolah kepada masyarakat (orang tua siswa). Selain itu, Komite Sekolah SMP Negeri 1 Balantak juga belum maksimal sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, peran Komite Sekolah SMP Negeri 1 Balantak sebagai pengontrol, hal ini terindikasi oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di SMP Negeri 1 Balantak. Peran lain Komite Sekolah di sekolah ini belum berjalan sebagaimana mestinya adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah dalam hal ini minim sekali memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah.

Permasalahan yang terkait dengan kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud harus segera dicarikan solusinya. Jika hal ini tidak dilakukan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Balantak tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Dengan demikian masyarakat melalui Komite sekolah tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak dapat berperan serta secara efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu dan transparan di SMP Negeri 1 Balantak.

Permasalahan

Permasalahan ini dalam kajian ini bagaimana perencanaan pelaksanaan dan kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak.

LANDASAN TEORI

Evaluasi Kinerja Komite Sekolah

Menurut Tyler (dalam Tayibnapi, 2008) evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Pengertian ini berorientasi aspek pendidikan atau hasil belajar. Cronbach dan Stufflebeam (dalam

Arikunto, 2013) mengatakan bahwa evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan telah dicapai tetapi juga digunakan untuk membuat keputusan.

Dengan mengacu pada pendapat ahli sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka dapat disintesis bahwa yang dimaksud dengan evaluasi pada penelitian ini adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan perbandingan sesuatu dengan kriteria (standar) sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dharma (2005:4) mengartikan kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan dan kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat disintesis kinerja adalah hasil pekerjaan secara kuantitas ataupun kualitas yang dicapai individu atau kelompok terkait dengan tujuan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu.

Komite sekolah sebagai "perwakilan" masyarakat ditingkat satuan pendidikan/sekolah yang merupakan konsekuensi dari meningkatnya kompleksitas dari organisasi sekolah sebagai akibat munculnya konsep MBS (Suryadi, 2003 dalam Padupai, dkk 2006). Dalam Permendiknas Nomor 44 tahun 2002 Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah merupakan mitra bagi sekolah dalam mewujudkan pendidikan bermutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan komite sekolah adalah badan atau perwakilan yang mandiri disatuan pendidikan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan disatuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud evaluasi kinerja komite sekolah adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, penilaian, dan perbandingan terhadap hasil kerja yang dicapai oleh badan yang mewadahi peran serta masyarakat (komite sekolah) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan disekolah tertentu.

Model-Model Evaluasi

Kaufman dan Thomas (dalam Arikunto, 2014), membedakan model evaluasi menjadi delapan yaitu, 1) *Goal Oriented Evaluation*, dikembangkan oleh Tyler; 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven; 3) *Formatif Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven; 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake; 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake; 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada kapan evaluasi dilakukan; 7) *CIPP Evaluation*

Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam; dan 8) *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus.

Model evaluasi yang digunakan adalah *Stake's Countenance Model*, *Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation University of Illinois*. Model Stake's sama dengan model CIPP dan CSE-UCLA (*Center for Study of Evaluation at the University of California at Los Angeles*) dimana ketiganya cenderung komprehensif dan mulai dari proses evaluasi selama tahap perencanaan dari pengembangan program (Kaufman and Susan, 1980:123). Stake mengidentifikasi 3 (tiga) tahap dari evaluasi program pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya yaitu: (1) *Antecedents* (2) *Transactions* (3) *Outcomes*.

1. *Antecedents* (sebelum program diimplementasikan) : Kondisi/ kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? Apakah kondisi/kejadian ini akan mempengaruhi program?
2. *Transactions* (pelaksanaan program) : Apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?
3. *Outcomes* (Hasil) : mengetahui akibat implementasi pada akhir program. Apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? apakah klien menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan? (Kaufman,1982:123). Setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu *description* (deskripsi) dan *judgment* (penilaian).

Untuk melakukan evaluasi menggunakan model Stake (*Countenance*) dapat dilakukan melalui langkah-langkah: pengumpulan data, analisis data, analisis *congruence*, pertimbangan hasil. Model *Countenance Stake* terdiri atas dua matriks. Matriks pertama dinamakan matriks deskripsi dan yang kedua dinamakan matriks *judgment*. Matriks *judgment* baru dapat dikerjakan oleh evaluator setelah matriks deskripsi diselesaikan. Matriks Deskripsi terdiri atas kategori rencana (*intent*) dan observasi. Matriks *judgment* terdiri atas kategori standard dan *judgment*.

Tujuan, Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Komite sekolah memiliki tujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan (Permendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).

Menurut Permendiknas no 44 tahun 2002, Komite Sekolah memiliki peran sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikian maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
4. Penghubung (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Selanjutnya, Dalam permendiknas No 44 Tahun 2002 tentang Dewan pendidikan dan komite sekolah disebutkan komite sekolah berfungsi: (a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri); (c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (d) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); 3) kriteria kinerja satuan pendidikan; 4) kriteria tenaga kerja kependidikan; 5) kriteria fasilitas pendidikan; dan 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (e) mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (f) menggali dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (g) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

Berdasarkan uraian tersebut. Maka dapat disintesiskan kmitte sekolah sebagai badan mandiri yang mewadahi aspirasi masyarakat memiliki peran sebaga pemberi pertimbangan dalam hal memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi ke sekolah, Sebagai pendukung dalam hal memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi pada penyelenggaran pendidikan yang bermutu di sekolah. Sebagai pengontrol dalam rangka keterbukaan penyelenggaraan dan penggunaan dana pendidikan di sekolah. Sebagai mediator, yakni penghubung antara semua komponen pendidikan di sekolah yang memiliki kepentingan bersama. Serta Komite Sekolah berfungsi sebagai mobilisasi dukungan, perhatian dan komitmen melakukan kerja sama dengan masyarakat pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah.

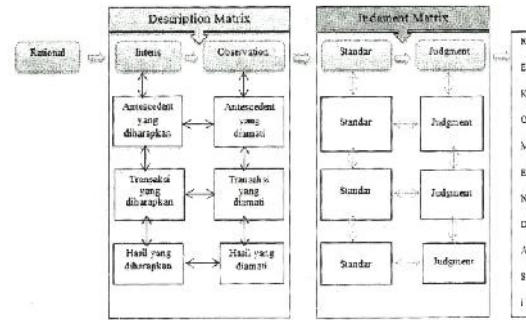
Kriteria Evaluasi Kinerj Guru

Kriteria dalam evaluasi ini mengacu pada :

1. Pedoman-pedoman tentang program pendidikan jasmani yang berlaku.
2. Persepsi para pengembang program yang terujinnsecara teoritis.
3. Pertimbangan evaluator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Balantak Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Penelitian dimulai pada bulan November 2015 smpai Pebruari 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengn model evaluasi yang digunakan adalah *countenance stake*. Desain peniitian ini menggunakan model evaluasi *countenance* yang di kembangkan Stake diadaptasi (Lukum,2005:30) seperti pada Gambar 3.1



Subjek penelitian ini adalah komite sekolah, kepala sekolah, guru sekolah, warga masyarakat, guru, dan rang tua siswa SMP Negeri 1 Balantak Kabupaten Banggai. Objek penelitian adalah kinerja komite sekolah yang meliputi: 1) *atecedent* (Perencanaan) 2) *transactin* (Pelaksanaan) dan 3) *Out Come* (Hasil). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi dokumentasi. Dari keseluruhan data yang diperoleh baik elalui angket, observasi serta studi dokumen dinalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai perolehan} \frac{S}{S + M} \times 100$$

Nilai perhitungan persentase (%) kemudian di konversikan dalm bentuk kualitatif untuk menentukan aktualitas ketercapaian.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pertama, hasil penelitian evaluasi komponen *antecedent* mencapai hasil persentase sebesar 73,18% dengan kualifikasi Cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan komite sekolah dan kepala sekolah bahwa adanya; perencanaan penyusunan program sekolah, perencanaan anggaran sekolah, perencanaan kurikulum dan pembelajaran, perencanaan ketenagaan di sekolah, perencanaan kurikulum dan pembelajaran, perencanaan ketenagaan di sekolah, perencanaan sarana dan prasarana, perencanaan HUSEMAS serta perencanaan penguatan iklim dan lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa komponen *antecedent* kinerja komite sekolah sebagian perencanaan di canangkan oleh komite sekolah telah terpenuhi, akan tetapi ada pula hal-hal poko lainnya (kriteria indicator) yang belum terpenuhi.

Perencanaan kerja komite sekolah dalam penyusunan program sekolah salah satunya adalah merumuskan Visi, Misi sekolah. Untuk mewujudkan hal yang dicita-citakan, sekolah sudah selayaknya menyusun visi dan misi sekolah yang kemudian dijadikan dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan di SMP Negeri 1 Balantak. Danim (2012) : 73) visi harus mampu

merangsang kreativitas dan bermakna secara fisik dan psikis komunitas instansi pendidikan. Dengan begitu seluruh warga sekolah akan bekerja sama dan ikut berpartisipasi untuk melaksanakan program tersebut. Perencanaan kerja komite sekolah dalam merencanakan penguatan dan iklim lingkungan sekolah yakni membangun kerja sama dengan semua stake holder pendidikan. Sebagaimana pula hasil wawancara dengan komite sekolah memberikan pernyataan bahwa komite sekolah selalu merencanakan yang terbaik untuk kemajuan Smp 1 Balantak, salah satunya membangun kerja sama dengan orang tua, masyarakat, masyarakat dunia usaha, sekolah lain agar terciptanya hubungan yang harmonis.

Ungkapan tersebut suatu keharusan demi kelancaran pendidikan di SMP Negeri 1 Balantak. Hubungan dengan masyarakat membawa manfaat yang menguntungkan bagi sekolah. Karena masyarakat memiliki peran bagi keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Hal ini senada berdasarkan pada pasal 3 peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: (1) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, (2) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan, (3) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, (4) pengadaan dan / atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional, (5) pengadaan dana dan pemberian bantuan sarana belajar. Oleh karena itu, kinerja komite sekolah dan pihak sekolah memiliki peran ganda Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56, tercantum bahwa komite sekolah dan madrasah diberikan peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui: (1) nasehat; (2) pengarahan; (3) bantuan personalia, material, dan fasilitas; maupun (4) pengawasan pendidikan.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen proses berada pada kualifikasi baik dengan capaian persentase 76,29%. Hal ini berarti kinerja komite sekolah berjalan agak sesuai yang diharapkan meskipun ada temuan-temuan yang belum relevan dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran kinerja komite sekolah.

Menurut Widoyoko (2010) evaluasi *transaction* atau pelaksanaan digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Dengan kata lain evaluasi *transaction* adalah penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan jauh sebelumnya atau melihat sejauh mana capaian implementasi perencanaan program kerja di sekolah.

Hasil temuan pada evaluasi *transaction* berupa pelaksanaan kinerja komite sekolah diantaranya: terlaksananya visi, misi, tujuan pengawasan terhadap sekolah; terlaksananya rapat RAPBS, adanya pemberian masukan, pertimbangan, verifikasi, pengesahan dan pelaksanaan anggaran di sekolah; adanya pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang

relevan dengan karakteristik peserta didik dan sekolah; mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah; Mengecek kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Menggalang dana dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, Keterlibatan masyarakat memberikan bantuan sarana atau prasarana di sekolah; Melaksanakan rapat secara berkala dengan sekolah, orang tua dan masyarakat, Adanya kunjungan di masyarakat, menggalang masyarakat memberikan dukungan pada sekolah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler; bekerjasama dengan sekolah dalam penelusuran alumni, mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kemitraan masyarakat, serta adanya MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat kepada peneliti bahwa masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah, baik berupa laporan pertanggungjawaban sekolah, kegiatan ekstra kurikuler, rapat orang tua, masyarakat dengan pihak sekolah dan sebagainya. Senada yang disampaikan oleh kepala sekolah, komite sekolah, guru bahwa intinya adalah sekolah selalu melibatkan masyarakat, orang tua dunia usaha dalam melaksanakan setiap kegiatan, pelaksanaan program, membangun silaturahmi, perekutan ketenagaan di sekolah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ihsan (dalam Armasyah, 2009: 84) peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain terutama dalam pengawasan terhadap sekolah (sosial kontrol). Pengawasan ini terhadap segala gerak-gerik sekolah selaku lembaga pendidikan, pengawasan dapat secara langsung atau lewat komite sekolah atau pun lewat media massa. Dengan demikian kegiatan pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi.

Mengacu pada pendapat tersebut masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagai pengawas berarti pengontrol terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah baik dalam hal penilaian pada pencapaian sekolah, citra sekolah, dan sebagainya. Selain berperan sebagai pengawas, masyarakat juga berperan sebagai donator dalam hal pendanaan baik berupa material maupun non material. Selain itu juga masyarakat sebagai pelaku dalam penyelenggaraan pendidikan, karena memiliki kepentingan di sekolah tersebut. Serta masyarakat sebagai peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Hal ini berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah yang berperan bahwa: masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Untuk mencapai hal tersebut sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya pemberdayaan komite sekolah dalam menggalang masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Komite sekolah sebagai perpanjangan

tangan dari sekolah berupaya agar meningkatkan komitmennya dalam meningkatkan kinerjanya. Menurut Danim (2012: 73) bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan mengoptimalkan kerja staf dan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Kinerja komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, orang tua, dunia usaha dan pemerintah adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dicantumkan dalam visi, misi, tujuan sekolah. Berbagai macam pendekatan yang harus dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas (2011: 200-201) beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat: (1) melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan; (2) mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya; (3) melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai kegiatan sekolah sesuai dengan minatnya; (4) memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Ketiga, Hasil dari komponen *outcome* berada dalam kualifikasi baik dengan rata-rata persentase yang dicapai sebesar 78,19%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan komite sekolah sudah baik ditinjau dari segi kinerjanya. Terbukti dengan adanya kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak banyak capaian yang diperoleh oleh siswa, iklim belajar menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini berlaku karena adanya kerjasama yang baik antara pihak warga sekolah dengan masyarakat serta peserta didik yang bersangkutan. Sependapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanjaya (2010: 202) faktor iklim sosial-psikologis juga sangat berpengaruh, yang ditunjukkan dengan kerjasama antar guru, saling menghargai dan saling membantu, maka memungkinkan iklim belajar menjadi sejuk dan tenang sehingga akan berdampak pada motivasi belajar siswa. Tetapi, ada juga temuan peneliti pada hal ini adalah sebagian kecil peserta didik di SMP Negeri 1 Balantak berhenti atau putus sekolah itu diakibatkan yang bersangkutan telah tiada atau pun faktor lain-lain, misalnya pindah sekolah.

Aspek-aspek hasil kinerja komite sekolah merupakan hasil dari semua kinerja yang dicapai oleh komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak. Keberhasilan kinerja komite sekolah tersebut dapat dilihat pada sekolah terakreditasi. Ini merupakan salah satu capaian yang patut dibanggakan, karena untuk mencapai akreditasi tersebut tidaklah mudah banyak rambu-rambu yang harus dilalui. Selain itu, sejumlah prestasi yang dicapai oleh siswa SMP Negeri 1 Balantak dari segi akademik maupun non akademik. Kemudian berkurangnya angka *drop out*, jumlah siswa meningkat setiap tahun ajaran, berkurangnya angka mengulang sekolah, serta semakin baiknya angka bertahan di sekolah. Indikator-indikator tersebut tercapai, karena lingkungan belajar di sekolah sangatlah mendukung

dan kondusif, akibatnya membuat siswa betah untuk belajar, adanya minat untuk berprestasi, semakin baiknya siswa untuk memotivasi dirinya agar belajar mandiri.

Berhasil atau tidaknya kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak adalah ada tidaknya capaian yang diperoleh oleh sekolah ataupun prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Adanya sejumlah prestasi yang dicapai oleh peserta didik, angka bertahan sekolah dan lain-lain serta sekolah terakreditasi merupakan dampak-dampak keberhasilan program-program kerja yang dicanangkan oleh komite sekolah. Selain itu juga adanya dukungan, partisipasi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Guna mencapai hasil yang memuaskan dan lingkungan yang kondusif, maka berbagai fasilitas yang dilengkapi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Balantak, seperti penyediaan ruang belajar yang memadai, perpustakaan yang cukup, alat dan bahan pelajaran yang menunjang, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyasa (2009: 76) mengungkapkan bahwa lingkungan yang kondusif harus ditunjang oleh fasilitas belajar yang menyenangkan dan lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan kreatifitas peserta didik. Dengan adanya fasilitas yang menunjang akan mencapai sekolah yang efektif yang menghasilkan generasi-generasi cemerlang. Danim (2012: 169) mengungkapkan bahwa kriteria sekolah efektif salah satunya yakni mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran.

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa untuk keberhasilan kinerja komite di sekolah membutuhkan sinergitas dari semua komponen pendidikan agar terjalinnya hubungan yang baik, saling menghargai, saling menghormati dan saling mendukung demi tercapainya tujuan pendidikan yang menciptakan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, bertaqwa kepada tuhan, jujur serta disiplin.

KESIMPULAN

Evaluasi kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak dalam perencanaan program kerja pada kualifikasi cukup. Evaluasi kinerja komite sekolah dalam pelaksanaan program kerja di SMP Negeri 1 Balantak berada pada kualifikasi baik. Evaluasi hasil kinerja komite sekolah di SMP Negeri 1 Balantak berada pada kualifikasi baik.

SARAN

1. Pihak sekolah hendaknya lebih proaktif melibatkan komite sekolah dalam berbagai pengambilan kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas sekolah.
2. Sebaiknya komite sekolah, kepala sekolah dan warga sekolah lebih meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan sekolah kedepan yang lebih baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sekolah.
3. Untuk meningkatkan kualitas kinerja komite sekolah, maka perlu diadakan pelatihan-

pelatihan tentang mobilisasi dukungan dari pihak masyarakat atau pemerintah atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya, serta mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat atau pemerintah.

4. Komite sekolah agar dapat meningkatkan peranannya sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Peran-peran tersebut dalam hal mensinergiskan dukungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayanan pendidikan bermutu di satuan pendidikan. Dengan demikian, komite sekolah menjadi perantara antara pihak masyarakat dengan sekolah dalam hal membina hubungan kerjasama guna mencapai pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Dasar-Dasar evaluasi pendidikan Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Dasar-Dasar evaluasi pendidikan Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Armansyah, 2009. *Peranan dan pemberdayaan komite sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Danim, Sudarman. 2012. *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung : Alfabeta
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lukum, Astin. 2013. *Evaluasi Pembelajaran IPA SMP di Kabupaten Bone Bolango*. Laporan Penelitian. Gorontalo: UNG.
- Mangkunegara. 2007. *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Adiatma.
- Mas Roskina Sitti. 2011. *Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Malang: El-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Permendiknas No 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah.
- Paduppai Darwing, dkk. 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar di Sulawesi Selatan*. Jurnal "Pendidikan Dan Kebudayaan", ISSN: 0215-2673, diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widoyoko, Eko Putro. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidikan dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar